

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Surabaya, Laksbang Justitia, 2013.
- Ahmad Mustanir, *Pelayanan Publik*, Pasuruhan, Qiara Media, 2015.
- Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2017.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017.
- Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cet. 2)*, Depok, Prenada Media, 2018.
- I Gusti Nyoman Guntur, *Pendaftaran Tanah*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014.
- Qamar, Nurul dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Tjahjo Arianto, *Pendaftaran Tanah Pertama Kali*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2017.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.
- Waskito, Hadi Arnowo, *Menyelenggarakan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019.
- Yusriadi, *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Deepublish, 2018.
- Widi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan*, Yogyakarta, Thafa Media, 2014.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2008.

Jurnal

Denada Ahmad Abdurrahman, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Raya*, Darussalam Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Kenegaraan, Vol. 5, No.1, 2021.

Ledy Wila Yustini, *Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah yang Pendaftarannya secara Sporadik berdasarkan PP 24 Tahun 1997*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.07, No. 02, 2022.

Sopamena Arthur Fresal, *Kinerja Pelayanan Sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon*, Saumlaki, Jurnal Otonomi Vol. 12 No. 24, 2019.

Utama Junianda Riva, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sumbawa*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018.

Zainal Henni, dkk, *Kinerja Pelayanan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Badan Pertanahan Kabupaten Banggai*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol 5 No 2, 2020.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas hak-hak Indonesia Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KEPMENDAGRI No.SK.26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Teknik Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Internet.

Profil Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus https://simpeg.atrbpn.go.id/simpeg_monev/profil/golongan/021216, di akses 7 Januari 2022.

